

# **ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015**

**Oleh :**

**Rabindrana Widyadzari**

**Dosen Pembimbing :**

**Mirna Amirya, MSA., Ak., CA., AAP- A., AAP- B**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan di Kota Batu pada tahun anggaran 2011 - 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Batu. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Data yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan yaitu Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2011-2015 sedangkan data yang digunakan untuk menilai tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan Pemerintah Kota Batu dengan menggunakan data hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian menunjukkan pola hubungan instruktif atau masuk dalam kategori rendah sekali, rasio efektivitas PAD termasuk dalam kategori sangat efektif, rasio efisiensi menunjukkan termasuk ke dalam kategori kurang efisien, rasio keserasian belanja modal masih bersifat fluktuatif, tingkat pertumbuhan telah menunjukkan pertumbuhan positif. Kemudian tingkat pendidikan Pemerintah Kota Batu menunjukkan peningkatan dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Melek Huruf (AMH), tingkat kesehatan Kota Batu menunjukkan peningkatan karena Pemerintah Kota Batu berhasil menekan angka kematian bayi, dan tingkat kemiskinan selama tahun anggaran 2011 - 2015 terus mengalami penurunan.

***Kata kunci : kinerja keuangan pemerintah, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan***

## **THE FINANCIAL AND NON-FINANCIAL PERFORMANCES OF THE LOCAL GOVERNMENT OF BATU CITY IN 2011-2015**

### **ABSTRACT**

The research aims to examine the local government's financial performance, education, health, and poverty in Batu City during 2011-2015 by applying qualitative descriptive approach. The financial performance of the local government in managing its finance is analyzed through financial ratio of the

budget as informed in the Budget Realization Reports in 2011 - 2015. Meanwhile, the education level, health, and poverty are based on the data issued by the Central Bureau of Statistics of Batu City. The result of the study shows that the financial independence ratio follows instructive pattern (in the category of “low”), the effectiveness ratio of the local own-source revenue is “very effective”, the efficiency ratio is categorized as “less efficient”, the matching ratio of capital expenditure is fluctuating, and the growth rates has already demonstrated positive trend. In addition, the education level in Batu city increases with regard to the indicators of the School Participation Rate and the Literacy Rate, the health level rises due to the decrease of the infant mortality rate, and the poverty rate continues declining during the fiscal year 2011-2015.

**Keywords:** *financial performance, financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, matching ratio, growth ratio, education, health, poverty*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pemerintah dibentuk untuk menjalankan aktivitas publik sehingga lembaga pemerintah bergerak tidak untuk mencari *profit*. Aktivitas publik yang dijalankan adalah pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, infrastruktur dan barang publik. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam pemerintahan Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai peraturan undang undang. Perkembangan signifikan yang terjadi antara lain dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dari sistem penganggaran tradisional menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi *cash basis* menjadi *accrual basis*.

Otonomi daerah terbentuk agar tercipta kemandirian dalam pemerintahan daerah yang berdasarkan pada UU No 32 Tahun 2004 yang disahkan tanggal 5 Oktober 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 yang disahkan tanggal 15 Oktober 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola potensi pada daerahnya. Dalam sistem tata kelola keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peran penting dan menjadi instrumen kebijakan utama pembangunan daerah. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Pada kenyataannya informasi dari laporan keuangan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan kebijakan, untuk membantu dalam menganalisis laporan keuangan maka dapat dengan cara menganalisis menggunakan metode metode yang sering digunakan dengan analisis rasio keuangan.

Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah, diantaranya adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah, yaitu dengan cara menghitung *share dan growth*, peta kemampuan keuangan daerah, dan indeks kemampuan keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

Dari hasil analisis rasio keuangan dapat dipergunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
3. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002: 169).

Hasil dari kinerja keuangan pemerintah dapat dicerminkan dari bagaimana perubahan-perubahan hasil dari program-program penting yang telah dijalankan di daerah tersebut, contoh diantaranya adalah perubahan di jumlah kemiskinan suatu daerah. Kemiskinan sendiri merupakan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang baik. Kemiskinan merupakan program penting bagi pemerintah daerah karena dengan adanya kemiskinan, masyarakat yang miskin akan kehilangan akses terhadap banyak sektor contohnya, pendidikan, kesehatan, harapan hidup dsb. Sehingga dengan kondisi demikian sebenarnya pemerintah daerah juga dituntut untuk memberikan kebijakan dalam menanggulangnya.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan di Kota Batu dengan memfokuskan penelitian pada Dinas Kesehatan dan Dinas

Pendidikan karena menurut Maksom dalam Nugroho (2007), Pendidikan merupakan cara strategis mutlak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kualitas suatu bangsa dalam mengurangi kemiskinan tersebut ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikan dan kesehatannya. Jika seseorang yang sakit dan tidak mampu membiayai pengobatan penyakitnya maka seseorang tidak bisa bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka tergolong masyarakat miskin. Dengan ini, diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan dapat memberikan upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kota Batu dalam memperbaiki kinerja keuangan guna meningkatkan pengentasan kemiskinan masyarakat.

Kota Batu memiliki keunggulan di bidang pariwisata dimana visi Kota Batu adalah “Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional” dari segi pariwisata sendiri telah berkontribusi-kan jumlah cukup besar pada PAD Kota Batu, selain pendapatan yang cukup besar dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jumlah belanja dan beban Pemerintah Kota Batu juga cukup besar untuk kota yang tidak terlalu luas dan termasuk ke dalam daerah otonomi termuda di Jawa Timur.

Berikut adalah data pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Batu tahun 2011-2015:

**Tabel 1.1 Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Kota Batu**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Total Realisasi Belanja</b>	<b>Total Realisasi Pendapatan</b>
2011	435.856.317.399	446.028.334.466,14
2012	435.188.559.661	495.994.989.183,38
2013	568.468.908.109	585.302.322.932,31
2014	797.294.924.728	703.680.192.404,53
2015	612.365.237.584	725.754.996.854,34

Sumber : APBD Pemerintah Kota Batu, data diolah (2017)

Maka peneliti ingin mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Kota Batu dengan beberapa rasio keuangan di tahun anggaran 2011 - 2015 karena mengingat data yang digunakan peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran maka untuk tahun sebelumnya dan tahun berjalan harus terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka data yang diaudit dan sudah tersedia adalah tahun anggaran 2011 - 2015.

Kota Batu pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Junrejo lalu kemudian ketiga kecamatan tersebut digabung dan Kota Batu ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Perkembangan selanjutnya dengan dasar hukum UU No 12/2001 Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang tepatnya tanggal 17 Oktober 2001 yang diperingati sebagai hari jadi Kota

Batu. Maka Kota Batu memang tergolong masih muda dalam pemerintahan, peneliti tertarik ingin menganalisa tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan di usia pemerintahan Kota Batu yang tergolong masih muda ini. Diharapkan analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menjadi alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai instrument dalam pengambil keputusan untuk kemajuan suatu daerah dilihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menilai kemampuan Pemerintah Kota Batu dalam mengelola keuangan daerah dan mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Penilaian Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2011 - 2015”**

## **2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang dijabarkan maka rumusan masalah dari penelitian antara lain yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Batu pada tahun anggaran 2011 - 2015 ?
2. Bagaimana tingkat pendidikan Kota Batu tahun anggaran 2011 - 2015 ?
3. Bagaimana tingkat kesehatan Kota Batu tahun anggaran 2011 - 2015 ?
4. Bagaimana tingkat kemiskinan Kota Batu tahun anggaran 2011 - 2015 ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Batu berdasarkan tahun anggaran 2011 - 2015
2. Untuk mengetahui tingkat pendidikan Kota Batu tahun anggaran 2011 - 2015
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Kota Batu tahun anggaran 2011 - 2015
4. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan Kota Batu tahun anggaran 2011 - 2015

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemerintah Daerah**

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (2) pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, fungsi pemerintah daerah adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah: dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan, pelayanan umum dan daya saing daerah,

- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Mohamad Mahsun (2012:25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang undangan selama satu periode anggaran.

### **Pengertian APBD**

Menurut Moh. Mahsun, dkk, (2011: 81), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012), pada era orde lama terdapat pula definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong, (1962: 81), yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

### **Laporan Keuangan Pemerintah**

PSAK No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan juga merupakan laporan yang terstruktur mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan entitas. Standar dalam laporan keuangan pemerintah dituangkan dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Menurut PSAP, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan

pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

### Analisis Keuangan

Pengertian analisis keuangan menurut Halim (2007:231) adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD perlu dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel.

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169)

#### Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas	Kriteri
Diatas 100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif

80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

Sumber : Anastasia (2012:82)

#### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2007:234). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Menurut Halim (2007:234) rumusan untuk menghitung tingkat efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

Efisiensi (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

#### Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung secara optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung daerah berarti persentase belanja langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Halim, 2001:272).

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi tahun ke } n - \text{Realisasi tahun ke } n - 1}{\text{Realisasi tahun ke } n - 1} \times 100\%$$

#### Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

### **Tingkat Kesehatan**

Pengertian Kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan” (Hariyanto;2012). Kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa, karena dengan penduduk yang sehat pembangunan diharapkan dapat berjalan lancar.

### **Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan berkenaan dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu berobat ke dokter, tidak mampu untuk sekolah dan tidak mampu untuk baca tulis. Kemiskinan adalah bila tidak memiliki pekerjaan sehingga takut menatap masa depan, tidak memiliki akses akan sumber air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kekurangan representasi dan kebebasan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, menurut Sekaran (2009:158) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang diteliti. Pada dasarnya penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu secara rinci, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas.

### **Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data *time series* yaitu berupa data rentetan waktu periode tahun anggaran 2011 - 2015 dari Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Batu. Penelitian ini fokus pada pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan menganalisis tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan presentase kemiskinan penduduk pada Kota Batu.

### **Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah keterangan yang bisa memberikan gambaran dan penjelasan atas suatu keadaan dan fenomena. Data terbagi atas dua jenis yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan tanpa adanya perantara. Data primer bisa berupa pendapat individual ataupun kelompok, dalam penelitian ini sumber datanya antara lain :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Pemerintah Kota Batu yang memiliki tugas untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan, merumuskan kebijakan, dan pemantauan, pelaporan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja Badan.

- b. SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki data pendukung untuk analisis permasalahan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perantara, data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Target dan Realisasi Pendapatan Belanja Kota Batu Tahun Anggaran 2011 - 2015.
- b. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPKAD Kota Batu.
- c. Data pendidikan, data kesehatan, data tingkat kemiskinan, dan ketenagakerjaan pada tahun 2011- 2015 Kota Batu.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pemimpin organisasi, kepala bagian ataupun staf secara langsung. Metode ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Batu dan juga pihak yang mampu memberikan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa data sekunder yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Biro Pusat Statistik Daerah Kota Batu.

### **Metode Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dari peneliti baik penelitian kepustakaan maupun penelitian yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian didiskripsikan sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari deskripsi yang rinci tentang kinerja keuangan pemerintah, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan di Kota Batu. Dengan analisis ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kinerja keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Batu. Adapun tahapan metode analisis dalam penelitian ini, yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan Rasio Keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung Rasio Keuangan dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun Anggaran 2011 - 2015 yang dilakukan dengan cara :

#### a. Menghitung Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu.

Data yang telah terkumpul dan sudah dinilai serta diukur, maka kemudian data dianalisis agar hasil penelitian mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Secara sistematis dapat diuraikan sebagai berikut ;

- a. Menilai kondisi keuangan Kota Batu berdasarkan rasio-rasio yang telah ditentukan sebagai indikator penilaian atas pengukuran kinerja keuangan.
- b. Melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan tersebut dengan cara membandingkan dari tahun ke tahun dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran tentang perkembangan kinerja keuangan Kota Batu.

b. Analisis Tingkat Pendidikan

Menganalisis data anggaran dan realisasi belanja Dinas Pendidikan Kota Batu menggunakan rasio efisiensi. Kemudian menganalisis taraf pendidikan dengan indikator yang ada.

c. Analisis Tingkat Kesehatan

Menganalisis data anggaran dan realisasi belanja Dinas Kesehatan Kota Batu menggunakan rasio efisiensi. Kemudian menganalisis taraf pendidikan dengan indikator yang ada.

d. Analisis Tingkat Kemiskinan

Menganalisis indikator kemiskinan di Kota Batu dari data Badan Pusat Statistik di Kota Batu dan dibandingkan dari tahun ke tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Rasio Keuangan

#### Analisis Tingkat Kemandirian

Rasio kemandirian atau juga bisa disebut rasio otonomi fiskal menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Batu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya, selain itu mampu bersaing dengan kabupaten lainnya dalam menyejahterahkan masyarakat. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian Kota Batu yaitu dengan membandingkan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bantuan pemerintah baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

#### Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan	Kemandirian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2): (3)	
2011	30.241.864.301,14	446.028.334.466,14	6,780%	Instruktif
2012	38.794.059.670,38	495.994.989.183,38	7,821%	Instruktif
2013	59.544.940.727,80	585.302.322.932,31	10,173%	Instruktif

2014	80.493.920.959,53	703.680.192.404,53	11,439%	Instruktif
2015	104,233,584,925.34	725.754.996.854,34	14,362%	Instruktif
Rata-Rata Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2011-2015			10,115%	Instruktif

Sumber : APBD Pemerintah Kota Batu, data diolah (2017)

### Analisis Tingkat Efektivitas PAD

Tingkat efektivitas dari PAD dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target atau anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234).

#### Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Efektifitas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2): (3)	
2011	30.000.000.000	30.241.864.301,14	100,806%	Sangat Efektif
2012	33.200.000.000	38.794.059.670,38	116,850%	Sangat Efektif
2013	50.793.502.612	59.544.940.727,80	117.229%	Sangat Efektif
2014	72.269.056.000	80.493.920.959,53	111.381%	Sangat Efektif
2015	97.926.818.089	104,233,584,925.34	106.440%	Sangat Efektif
Rata-Rata Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2011-2015			110.541%	Sangat Efektif

Sumber : APBD Pemerintah Kota Batu, data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015 secara keseluruhan telah berada di atas anggaran PAD yang telah ditetapkan. Realisasi PAD dari tahun 2011 sampai tahun 2015 juga terus mengalami peningkatan. Sesuai dengan rasio interval pedoman penilaian dan kinerja keuangan, maka tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kota Batu untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015 sangat efektif, karena berada pada interval di atas 100 persen.

Rata-rata rasio efektifitas keuangan daerah pada tahun anggaran 2011 sampai 2015 sebesar 110,541% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Batu baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

### Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara total

realisasi pengeluaran (Belanja Daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2007:234).

**Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Total Realisasi Belanja</b>	<b>Total Realisasi Pendapatan</b>	<b>Efisiensi (%)</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)=(2): (3)	
2011	435.856.317.399	446.028.334.466,14	97,719%	Kurang Efisien
2012	435.188.559.661	495.994.989.183,38	87,741%	Cukup Efisien
2013	568.468.908.109	585.302.322.932,31	97,124%	Kurang Efisien
2014	797.294.924.728	703.680.192.404,53	113,304%	Tidak Efisien
2015	612.365.237.584	725.754.996.854,34	84,376%	Cukup Efisien
Rata-Rata Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2011-2015			96,053%	Kurang Efisien

Sumber : APBD Pemerintah Kota Batu, data diolah (2017)

Dari Tabel 4.4. dapat diketahui bahwa rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kota Batu tahun 2011 adalah sebesar 97,719%, tahun 2012 adalah sebesar 87,741%, tahun 2013 sebesar 97,124%, tahun 2014 adalah sebesar 113,304%, dan tahun 2015 sebesar 84,367% atau sesuai dengan Tabel 4.5 tahun 2011 dan 2013 tergolong kriteria kurang efisien, karena berada pada interval 90 - 100 persen. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang sedikit lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Tahun 2014 tergolong kriteria tidak efisien, karena berada pada interval lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang lebih sedikit daripada realisasi belanja daerah.

**Analisis Tingkat Keserasian Belanja Modal**

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri.

**Perhitungan Tingkat Keserasian Belanja Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>Total Belanja Modal</b>	<b>Keserasian (</b>
(1)	(3)	(2)	(4)=(2): (3)
2011	435.856.317.399	106.341.048.268	24,398%
2012	435.188.559.661	65.462.125.992	15,042%

2013	568.468.908.109	155.842.580.700	27,414%
2014	797.294.924.728	136.626.885.534	17,136%
2015	612.365.237.584	281.882.302.047	46,032%
Rata-Rata Tingkat Keserasian Belanja Tahun Anggaran 2011-2015			26,005%

Sumber : APBD Pemerintah Kota Batu, data diolah (2017)

Dari perhitungan rasio keserasian tersebut dapat dilihat bahwa belanja modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2011 rasio belanja modal sebesar 24,398% mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 15,042%, kemudian naik pada tahun 2013 menjadi 27,414%, dan pada tahun 2014 turun lagi menjadi 17,136%. Baru pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 46,032%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 26,005%.

### **Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Titik berat analisis pertumbuhan terhadap pendapatan daerah dalam penelitian ini adalah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh atas PAD yaitu, ketentuan yang berupa peraturan daerah (dengan berpedoman pada UU dan PP), penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta sistem pemungutannya, dan penilaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Batu.

#### **Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi PAD tahun ke n-1</b>	<b>Realisasi PAD tahun ke n</b>	<b>Pertumbuhan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)=(2): (3)
2010	17.735.602.953,95		
2011	30.241.864.301,14	30.241.864.301,14	70.515%
2012	38.794.059.670,38	38.794.059.670,38	28.279%
2013	59.544.940.727,80	59.544.940.727,80	53.490%
2014	80.493.920.959,53	80.493.920.959,53	35.182%
2015	104.233.584.925,34	104.233.584.925,34	29.492%
Rata-Rata Rasio Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2011-2015			43.392%

Sumber : APBD Pemerintah Kota Batu, data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.7 maka rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Batu untuk tahun 2015 terhadap tahun sebelumnya menunjukkan pertumbuhan sebesar 43,392%. Presentase pertumbuhan PAD terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 70,515%, sedangkan pertumbuhan PAD terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 28,279%.

Rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Batu selama tahun 2011-2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini memberikan gambaran keberhasilan Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan PAD. Berdasarkan kinerja keuangan pemerintah Kota Batu masih belum optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Batu masih sangat tergantung dana perimbangan karena PAD Kota Batu sangat rendah.

#### **Pendidikan dan Taraf Pendidikan Kota Batu**

Pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kota Batu didasarkan pada data anggaran dan realisasi yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Batu 2011 - 2015, yang kemudian diklasifikasikan kembali sesuai kebutuhan analisa data.

#### **Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Efisiensi</b>
(1)	(2)	(3)	(4)=(2): (3)
2011	116.459.786.686	40.680.000,00	28,62
2012	131.840.678.148	48.890.000,00	26,96
2013	138.459.246.569	59.450.000,00	23,29
2014	172.890.652.870	67.900.000,00	25,46
2015	203.596.588.202	75.000.000,00	27,14
Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2011-2015			28,62

Sumber : APBD Pemerintah Kota Batu, data diolah (2017)

Ukuran yang sangat mendasar dalam tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas. Penduduk Kota Batu yang dapat membaca dan menulis pada tahun 2013 sudah mencapai 98,37 persen, sisanya 1,63 persen tidak dapat baca tulis. Pada tahun 2013 persentase penduduk Kota Batu yang melek huruf atau bisa baca tulis mengalami kenaikan yaitu dari 98,32 persen pada tahun 2012 menjadi 98,37 persen pada tahun 2013. Dengan meningkatnya angka melek huruf berarti penduduk yang buta huruf pada tahun 2013 hanya sebesar 1,63 persen. Dibandingkan angka melek huruf Propinsi Jawa Timur, Kota Batu masih lebih baik, di mana AMH Jawa Timur tahun 2011 sekitar 88,52 persen, tahun 2012 menjadi 89,28 persen dan pada tahun 2013 ini sebesar 90,49 persen.

**Tabel 4.1 Angka Melek Huruf & Buta Huruf tahun 2011– 2015**

Tahun	Melek Huruf		Buta Huruf	
	Kota Batu	Jawa Timur	Kota Batu	Jawa Timur
2011	98,27	88,52	1,73	11,48
2012	98,32	89,28	1,68	10,72
2013	98,37	90,49	1,63	9,51
2014	94,79	92,23	5,21	7,77
2015	97,54	91,47	2,46	8,53

Sumber : Hasil Susenas 2011-2015, BPS Prov. Jatim, data diolah (2017)

Penduduk Kota Batu yang dapat membaca dan menulis pada tahun 2015 sudah mencapai 97,54 persen, sisanya 2,46 persen tidak dapat baca tulis. Pada tahun 2015 persentase penduduk Kota Batu yang melek huruf atau bisa baca tulis mengalami kenaikan yaitu dari 94,79 persen pada tahun 2014 menjadi 97,54 persen pada tahun 2015. Dengan kenaikan angka melek huruf berarti penduduk yang buta huruf pada tahun 2015 hanya mencapai 2,46 persen. Dibandingkan angka melek huruf Propinsi Jawa Timur, Kota Batu masih lebih baik, di mana AMH Jawa Timur tahun 2013 sekitar 90,49 persen, tahun 2014 menjadi 92,23 persen dan pada tahun 2015 ini sebesar 91,47 persen.

Pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Batu didasarkan pada data anggaran dan realisasi yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Batu 2011 - 2015, yang kemudian diklasifikasikan kembali sesuai kebutuhan evaluasi.

#### **Tingkat Kesehatan dan Taraf Kesehatan Kota Batu**

Pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Batu didasarkan pada data anggaran dan realisasi yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Batu 2011 - 2015, yang kemudian diklasifikasikan kembali sesuai kebutuhan evaluasi.

#### **Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):
2011	17.148.675.840	2.789.560.300	0,061
2012	19.459.167.605	3.491.340.550	0,055
2013	22.034.976.584	3.892.670.600	0,056
2014	26.005.689.556	4.541.790.750	0,057
2015	30.640.904.994	5.006.189.900	0,061

Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2011-2015	0,058
--	-------

Sumber : APBD Pemerintah Kota Batu, data diolah (2017)

Secara keseluruhan total belanja Dinas Kesehatan Kota Batu dari tahun ke tahun pada periode 2011 – 2015 dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Batu belum efisien dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja atau dengan kata lain realisasi belanja melebihi dari realisasi pendapatan yang ditetapkan.

Rata-rata dari rasio efisiensi belanja Dinas Kesehatan Kota Batu sebesar 0,058%. Pada laporan program kegiatan Dinas Kesehatan Kota Batu diketahui bahwa pada program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan presentase realisasinya hanya 69,48%. Hal tersebut berdampak pada serapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Batu pada tahun 2015.

Diantara beberapa ukuran kesehatan yang ada, indikator yang digunakan untuk melihat taraf kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH), dan penolong persalinan. Ketiga indikator tersebut sangat peka terhadap setiap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga selain sebagai ukuran kesehatan, ketiganya bisa juga memberikan indikasi kondisi kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada bidang pendidikan, pada sub bab kesehatan juga akan disajikan data alokasi dana yang disediakan untuk bidang kesehatan.

Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan, diantaranya pola hidup sehat, pola konsumsi makanan, dan kualitas lingkungan perumahan. Angka Harapan Hidup juga digunakan sebagai indikator untuk menilai taraf kesehatan masyarakat. Mencermati AHH juga selalu tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai kesehatan, sebab angka-angka inilah yang mempunyai kaitan langsung dengan taraf kesehatan. Disamping fungsinya sebagai indikator pembangunan ekonomi, sering kali juga digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan.

Pada dasarnya AHH untuk jangka pendek relatif stabil karena program pembangunan apapun termasuk bidang kesehatan yang diterapkan kepada masyarakat bukanlah merupakan program yang bersifat instan, sehingga memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat melihat hasil dari kebijakan penerapan program tersebut.

Hubungan antara pembangunan sosial ekonomi dengan AHH berkaitan erat dan positif. Bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik, maka AHH juga semakin tinggi, atau sebaliknya bila AHH lebih tinggi, maka mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah semakin maju. Angka Harapan Hidup Kota Batu pada tahun 2013 menunjukkan nilai 70,32 atau mengalami kenaikan sebesar 0,32 bila dibandingkan data tahun 2012. Namun demikian Angka Harapan Hidup yang dicapai Kota Batu masih berada di bawah rata-rata Angka Harapan Hidup Jawa Timur. Angka Harapan Hidup Kota Batu pada tahun 2015 menunjukkan nilai 72,16 atau mengalami kenaikan sebesar 0,10 bila dibandingkan data tahun 2014. Namun demikian Angka Harapan Hidup yang dicapai Kota Batu masih berada di bawah rata-rata Angka Harapan Hidup Jawa Timur.

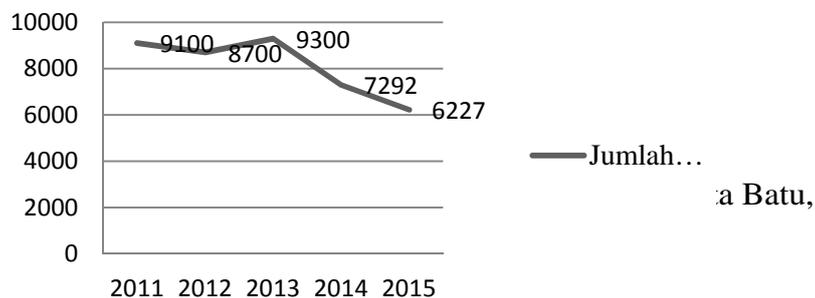
### **Kemiskinan di Kota Batu**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah, di mana kondisi atas ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan pokok sandang pangan maupun papan (World Bank, 2007).

Kemiskinan diartikan oleh Mubyanto (2002) dalam Hasugian (2006) merupakan bentuk dari ketidakmampuan terhadap pihak penguasa sehingga mereka dikategorikan sebagai pihak yang lemah yang tidak dapat berbuat apa-apa, terancam dan tereksplorasi.

#### **Jumlah Penduduk Miskin di Kota Batu**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)
2011	9,1
2012	8,7
2013	9,3
2014	7,2
2015	6,2



### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut, berdasarkan kinerja keuangan pemerintah Kota Batu masih belum optimal. Pelaksanaan pembangunan di Kota Batu masih sangat tergantung dana perimbangan karena PAD Kota Batu masih rendah. Realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga masih belum efisien dimana jumlah realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja.

Pendidikan Kota Batu menunjukkan peningkatan. Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur dari pemerataan dan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan buta huruf. Kesehatan Kota Batu menunjukkan peningkatan. Berdasarkan indikator tingkat kesehatan, Kota Batu berhasil menekan angka kematian bayi.

Tingkat kemiskinan selama tahun anggaran 2011 - 2015 terus mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS kemiskinan Kota Batu dari tahun 2011 - 2015 mengalami penurunan, Di pedesaan wilayah Kota Batu, sebab utama kemiskinan terutama di wilayah yang tergolong sangat miskin, yakni persoalan kepemilikan, penguasaan, pemafaatan dan pengelolaan tanah.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan data jumlah miskin di Kota Batu dimana ternyata data jumlah penduduk miskin yang ada di Dinas Sosial dan yang ada pada Badan Pusat Statistik Kota Batu berbeda, maka peneliti menggunakan data yang ada pada Badan Pusat Statistik.

#### **Saran**

Bagi Pemerintah

Penggalian potensi PAD perlu ditingkatkan guna mengetahui dampak yang terjadi dapat menurunkan kemiskinan. Dalam meningkatkan PAD perlu adanya kehati-hatian bagi pemerintah daerah dalam menentukan tarif yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau yang bersifat memaksa. Disarankan untuk dapat menggali potensi yang lain seperti BUMD, investasi daerah. Pengeluaran pemerintah yang tidak dialokasikan untuk pengurangan kemiskinan perlu dikurangi dan dapat dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan.

Meningkatkan efisiensi dengan cara memberikan alokasi lebih besar pada sektor pendidikan dan kesehatan karena kedua sektor ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan mutu pendidikan guru, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, penambahan jumlah kelas di tiap-tiap sekolah, penambahan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan lain sebagainya. Pada sektor kesehatan dengan tetap fokus kepada efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pemerintah hendaknya lebih memprioritaskan menambah jumlah peskesmas di tiap-tiap kecamatan yang ada karena jumlah puskesmas masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Batu.

Bagi peneliti selanjutnya

Variabel-variabel rasio yang di gunakan untuk mengetahui kinerja keuangan sangat beragam, sehingga peneliti selanjutnya dapat mencari variabel pengukuran kinerja yang lain. Penelitian ini hanya terbatas pada daerah Kota Batu, sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas bahkan membandingkan kinerja keuangan satu daerah dibandingkan dengan daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abudzar, Fajar. 2011. *Analisa Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Pendidikan Jawa Barat tahun 2003-2008*. Skripsi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Aji, Ginanjar. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Kota Batu Dalam Angka*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Kota Batu Dalam Angka*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Kota Batu Dalam Angka*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kota Batu Dalam Angka*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kota Batu Dalam Angka*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Batu*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Batu*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Batu*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Batu*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Batu*. Batu : Badan Pusat Statistik Kota Batu.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Erlangga.

Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nugroho, Setyo. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Dan Kabupaten Karanganyar Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Skripsi. Surakarta: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Putriani, Nana Niluh. 2014. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota Bali*. E-jurnal Universitas Udayana. Vol. 6.3 hal 481-497.

Pratidina, Mega. 2013. *Kinerja Keuangan Pemerintah serta Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008–2010*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya

Sekaran, U. 2000. *Research Method for Bussiners: A Skill-Building Approach*, Thrid Edition. New York: John Wiley.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.